PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara

PT PERTAMINA (PERSERO)

Dengan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Tentang
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT

Nomor : SP-018/K00000/2020-S8
Nomor : 579/Un.06/HM.01/02/2020

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (**28-02-2020**) bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

1. **PT Pertamina (Persero)**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 17 September 2003 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 29 tanggal 13 April 2018 dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008395.AH.01.02. tahun 2018 beralamat di Jl. Medan Merdeka Timur No.1A - Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini diwakili oleh **Koeshartanto** selaku **Direktur SDM** sesuai Surat Keputusan Kementerian BUMN PT Pertamina (Persero) No. SK-232/MBU/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas, selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, suatu perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965 yang saat itu berstatus IAIN Alauddin Makassar dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 berubah menjadi Universita Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong, Gowa dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berdasarkan Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 213 tanggal 14 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**",

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan usaha yang bergerak di bidang energi terutama minyak dan gas bumi beserta hasil olahan dan turunannya, yang mendapatkan penugasan untuk menerima peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan mengirimkan mahasiswanya yang memenuhi persyaratan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat untuk dapat melakukan program magang di **PIHAK PERTAMA**.
- Bahwa berdasarkan :
  a) Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian, Kementrian Pendidikan & Kebudayaan, Kementrian Riset & Pendidikan Tinggi, Kementrian Ketenagakerjaan, dan Kementrian BUMN tahun 2016 tetang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri;
  b) Piagam Kerja Sama antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Forum Human Capital Indonesia No. 117.A/Un.06/HM.01/4/2019 dan No. 117/SK/FHCI/IV/2019,

  perlu dilaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di PT Pertamina (Persero).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri melalui Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) yang selanjutnya disebut **"PERJANJIAN"** dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi, di dalam **PERJANJIAN** ini, yang dimaksud dengan:

1. Peserta adalah Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang telah lulus seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**;
2. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, yang selanjutnya disebut Program, adalah Program yang dibuat untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja Peserta di lingkungan perusahaan;
3. Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi atas calon Peserta Program yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** untuk dapat diterima sebagai Peserta Program di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
4. Evaluasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan di akhir Program oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PERJANJIAN** ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program dengan Peserta yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan di **PIHAK PERTAMA**.
2. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada Peserta untuk menyalurkan potensi dan menggali pengalaman di BUMN (*link and match* Perguruan Tinggi dengan industri).

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK KEDUA** sebagai institusi Pendidikan yang menyelenggarakan program pembelajaran berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan jurusan **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK KEDUA** mengirimkan Peserta Program yang telah terseleksi kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan dan bantuan kepada Peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pembelajaran dan pembimbing yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan Program.

Pasal 4
PERSYARATAN PESERTA PROGRAM

Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Masih berstatus Mahasiswa aktif;
3. IPK Minimal 2.75;
4. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 5
SELEKSI PENERIMAAN

1. Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta oleh **PIHAK KEDUA** dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
PELAKSANAAN KERJA SAMA PROGRAM

1. Pelaksanaan **PERJANJIAN** ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia;
2. Lokasi kegiatan kerja Program bertempat di lokasi kerja milik **PIHAK PERTAMA** dan Anak Perusahaan-nya.
3. **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi:
   a. Menyediakan lokasi Program bagi Peserta yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
   b. Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup **PERJANJIAN** yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
   c. Memberikan bantuan uang saku sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing Peserta per bulan;
   d. Uang saku akan dibayarkan setiap bulan selambat-lambatnya setiap tanggal terakhir di bulan berjalan. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak masuk kerja secara penuh selama 1 (satu) bulan, maka pemberian uang saku akan diberikan secara proporsional.
   e. **PIHAK PERTAMA** memberikan izin tidak hadir dalam program maksimal 1 (satu) hari kerja setiap bulannya dengan tidak memotong uang saku bulanan.
   f. Mendaftarkan dan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
   g. Memberikan bantuan sebesar Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu) yang di transfer langsung ke rekening peserta program untuk dibayarkan sebagai iuran BPJS Kesehatan.
   h. Mekanisme pemberian uang saku dan bantuan iuran kesehatan sebagaimana dimaksud dalam butir c dan g ayat (1) Pasal ini ditransfer langsung oleh **PIHAK PERTAMA** ke rekening bank atas nama Peserta yang bersangkutan;
   i. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program;
   j. Memberikan sertifikat industri/sertifikat kompetensi kepada peserta setelah menyelesaikan program.
   k. Memberi izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan logo **PIHAK PERTAMA** dalam sosialisasi kerja sama program magang mahasiswa.
   l. Melakukan evaluasi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
   m. Memberikan teguran apabila Peserta Program melanggar tata tertib yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
   n. Mengembalikan Peserta Program dari **PIHAK KEDUA** apabila Peserta Program melakukan tindak pidana atau mengulang pelanggaran tata tertib sebagaimana poin m di atas.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
   a. Menyediakan Peserta Program yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
   b. Memberikan perizinan/kesempatan bagi Peserta untuk mendukung Program di lingkungan **PIHAK PERTAMA** selama jangka waktu 6 (enam) bulan;
   c. Mewajibkan Peserta Program untuk menyusun laporan akhir hasil Program dan mengirimkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
   d. Memastikan Peserta Program untuk dapat mengikuti Program sampai dengan selesai (6 bulan).

Pasal 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

PERJANJIAN ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan **PERJANJIAN** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap **PERJANJIAN** ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu perjanjian. **PARA PIHAK** juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan sehingga pengadilanlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan **PERJANJIAN** dan/atau pemberian ganti rugi.
2. **PARA PIHAK** berhak mengakhiri **PERJANJIAN** ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran **PERJANJIAN** apabila memenuhi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
   a. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini;
   b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai atau tidak menghasilkan keputusan yang disepakati **PARA PIHAK** dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak perselisihan timbul, maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang pada saat tanggal Perjanjian ini bertempat di Wahana Graha Lt. 1, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Kamar Dagang

dan Industri (KADIN) No. SKEP/152/DPH/1977 tertanggal 30 November 1977, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BANI.

3. Keputusan BANI merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

1. Suatu **PIHAK** dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **PERJANJIAN** ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari **PIHAK** tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar **("KEADAAN KAHAR").**
2. Kejadian-kejadian berikut adalah **KEADAAN KAHAR**: a) kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; atau b) gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; atau c) sengketa industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau d) perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
3. Suatu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **PERJANJIAN** ini dengan alasan **KEADAAN KAHAR** jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut, kecuali kewajiban pembayaran.
4. **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** harus segera memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan diikuti dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian **KEADAAN KAHAR** tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan **PERJANJIAN** serta mengatasi akibat yang ditimbulkan oleh **KEADAAN KAHAR** tersebut.
5. **PIHAK** yang menerima pemberitahuan **KEADAAN KAHAR** tersebut dapat menolak atau menerima dalam hal pemberitahuan adanya **KEADAAN KAHAR** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja secara tertulis.
6. Apabila **KEADAAN KAHAR** ditolak oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan **KEADAAN KAHAR**, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya sesuai dengan kesepakatan. Jika **KEADAAN KAHAR** disetujui, **PARA PIHAK** akan merundingkan kembali kelanjutan dari pelaksanaan kewajiban **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** tersebut.
7. Apabila **KEADAAN KAHAR** berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut, maka **PARA PIHAK** dapat bersepakat untuk mengakhiri **PERJANJIAN**.

Pasal 12
KERAHASIAAN INFORMASI

1. Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh **PIHAK PERTAMA**, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut **PERJANJIAN** ini merupakan informasi yang bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**").
2. **PIHAK KEDUA**, termasuk **Peserta**, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan **Informasi Rahasia** tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua **Informasi Rahasia**, termasuk mewajibkan **Peserta Program** untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.
4. Ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini di atas tidak berlaku untuk informasi yang: a) sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam **PERJANJIAN** ini; atau b) merupakan milik **PIHAK KEDUA** yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum **PERJANJIAN** ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut **PERJANJIAN** ini; atau c) harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas **PERJANJIAN** atau **PIHAK KEDUA**; atau d) harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
5. Jika **PIHAK PERTAMA** terikat dalam suatu perjanjian dengan pemilik data/informasi *(confidentiality agreement)* berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan **PIHAK PERTAMA** atau pemilik data/informasi itu, yang isinya sesuai dengan *confidentiality agreement* antara **PIHAK PERTAMA** dengan pemilik data/informasi tersebut.
6. **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengembalikan seluruh **Informasi Rahasia** kepada **PIHAK PERTAMA**, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua *copy* yang masih dipegang oleh **PIHAK KEDUA** pada saat **PERJANJIAN** berakhir.
7. Kewajiban **PIHAK KEDUA** tentang kerahasiaan yang diatur dalam **PERJANJIAN** ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya **PERJANJIAN**.
   Jika berdasarkan **PERJANJIAN** ini, **PIHAK KEDUA** diizinkan untuk mengungkapkan **Informasi Rahasia** kepada pihak lain selain **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahu **PIHAK PERTAMA** secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) **HARI KALENDER** sejak **Informasi Rahasia** tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan **Informasi Rahasia** itu, mana yang lebih dulu. Dalam pemberitahuan tersebut, **PIHAK KEDUA** harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

Pasal 13
LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PERJANJIAN** ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan **PARA PIHAK**, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya **PERJANJIAN** ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan atas **PERJANJIAN** ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**
3. Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan perjanjian tersendiri di luar **PERJANJIAN** ini.
4. Hasil kesepakatan atas perubahan **PERJANJIAN** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan dituangkan dalam sebuah Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
5. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya berdasarkan **PERJANJIAN** akan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, diserahkan langsung atau dikirim dengan komunikasi elektronik lainnya sebagai berikut:

   Apabila kepada **PIHAK PERTAMA**:
   PT Pertamina (Persero)
   Pertamina Simprug Residence Lantai 2, Pertamina Corporate University
   JalanTeuku Nyak Arief, Simprug, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan 12220.
   Cq : Ratna Ayu Ningrum
   Alamat Email : Ratna.Ningrum@pertamina.com
   Telepon : (021) 7223029-32, ext 3833

   Apabila kepada **PIHAK KEDUA**:
   Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
   Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong, Kab. Gowa
   Cq : Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.
   Alamat email : kerjasama@uin-alauddin.ac.id
   Telepon : (0411) 868720

   Apabila tidak ada bukti tanda terima dari penerima dokumen, maka setiap pemberitahuan atau komunikasi lain akan dianggap telah diterima pada hari kalender berikutnya setelah pengiriman. Dokumen sudah dianggap diterima apabila dikirim melalui kurir yang dapat dibuktikan dengan tanda terima. Masing-masing **PIHAK** dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya
6. **PERJANJIAN,** lampiran dan kesepakatan di antara **PARA PIHAK** sebelum pelaksanaan **PERJANJIAN** baik secara lisan maupun tertulis yang bertentangan dengan isi **PERJANJIAN** dikesampingkan dan dianggap tidak berlaku.
7. Apabila sebagian dari ketentuan **PERJANJIAN** atau penerapannya kepada situasi atau kondisi apapun dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya dari **PERJANJIAN** tidak akan terpengaruh, dan setiap ketentuan lainnya tersebut adalah sah dan dapat dilaksanakan sepenuhnya sejauh yang diizinkan oleh hukum. Apabila terjadi ketidakabsahan terhadap ketentuan dalam **PERJANJIAN** secara

sebagian tersebut, **PARA PIHAK** setuju dengan itikad baik untuk menggantikan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan yang paling mendekati maksud dari ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

8. **PERJANJIAN** ini merupakan satu kesatuan bagian dengan lampiran-lampirannya dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** setelah tanggal **PERJANJIAN** ini sehubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.

PERJANJIAN ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal **PERJANJIAN**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA **PT PERTAMINA (PERSERO),**	**PIHAK KEDUA** **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,**
PT PERTAMINA (PERSERO) DIREKTUR SDM METERAI TEMPEL 3D1D7AHF218562086 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Koeshartanto **Direktur SDM**	**Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag** **Wakil Rektor Bid. Kerjasama dan Pengembangan Lembaga**